

TRANSIT POIN, KOTA YOGYA SIAP KELOLA SAMPAH

Seluruh Depo dan TPS Berhasil Dinormalisasi

YOGYA (KR) - Seluruh depo dan TPS di Kota Yogya yang sebelumnya dipenuhi sampah kini berhasil dinormalisasi. Meski demikian, sebagai transit poin maka keberadaan depo selalu akan menjadi jujugan masyarakat menaruh sampah.

Penjabat Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengungkapkan selama tiga hari sejak Selasa (9/7) hingga Kamis (11/7) jajarannya berjibaku untuk mengosongkan tumpukan sampah di seluruh depo dan TPS. "Kita memiliki 12 depo dan satu TPS. Alhamdulillah kondisinya per 11 Juli kemarin sudah bisa normal seperti kondisi biasa," tandasnya dalam jumpa media, Jumat (12/7).

Meski demikian, keberadaan depo dan TPS sebagai transit poin sebelum didistribusikan ke unit pengolahan sampah (UPS) maka tidak akan bisa sela-

manya bersih dari sampah. Pasalnya, dalam hitungan hari bahkan jam, depo akan kembali terisi oleh sampah yang disetorkan oleh masyarakat. Namun pihaknya tetap berkomitmen bahwa kondisi sampah di depo tidak akan meluber maupun tidak tertangani. "Segala daya, upaya dan kebijakan akan terus kami lakukan untuk menangani sampah. Kami juga tegaskan bahwa Kota Yogya tidak membuang sampah tetapi mengolah sampah," imbuhnya.

Selama tiga hari menormalisasi depo dan TPS ter-

dapat 1.059,181 ton sampah yang berhasil diangkut. Seluruhnya lantas diolah ke UPS seperti di TPS3R Nitikan, Kranon, Karangmiri maupun TPA Piyungan yang dikelola Pemkot. Untuk mengantisipasi supaya kondisi depo tidak kembali meluap, pihaknya mengajak masyarakat maupun pelaku usaha agar berkomitmen melakukan pemilahan dan pengolahan.

Sugeng menjelaskan, sampah sudah harus dipilah antara organik, anorganik dan residu sejak dari rumah. Selanjutnya sampah anorganik disetorkan ke bank sampah yang kini sudah tersebar merata di tiap wilayah berbasis RW. Kemudian sampah organik dikelola mandiri seperti sistem biopori maupun lodong sisa dapur, komposter atau

penyaluran ke mitra pengolahan. Selanjutnya sampah residu yang kemudian disetorkan ke depo atau TPS. "Bagaimanapun juga kondisi depo akan selalu ada sampah. Kalau depo kosong lantas masyarakat mau menaruh residunya kemana. Tetapi komitmen kami supaya tidak terjadi penumpukan yang tidak tertangani," jelasnya.

Oleh karena itu sebagai bentuk komitmen bersama maka jam operasional depo juga diatur sesuai jadwal. Dalam seminggu akan dilakukan penutupan dua hari yakni pada Rabu dan Minggu untuk kepentingan normalisasi. Sedangkan hari lain juga diatur jenis sampah yang bisa dimasukkan ke depo. Yakni Senin untuk residu anorganik, Selasa untuk residu organik, Kamis untuk residu anorganik serta



KR-Istimewa

Kondisi depo sampah di Mandala Krida, Jumat (12/7) yang sudah berhasil dinormalisasi.

Jumat dan Sabtu untuk residu organik. Residu organik contohnya seperti dedaunan, sedangkan residu anorganik seperti plastik kotor, kertas ma-

kan dan lainnya. "Kemudian yang bisa menyetorkan sampah ke depo ialah pemuangan mandiri, gerobak sampah dan motor roda tiga. Ja-

ngan dibuang sembarangan ke pinggir-pinggir jalan. Tolong kesadarannya harus dibangun. Setorkan residunya ke depo," ungkapnya. **(Dhi)-f**

KOLABORASI PERTAMINA RETAIL DAN PATRA NIAGA SPBU Lempuyangan Dilengkapi Ruang Kreatif Difabilitas



KR-Ardhi Wahdan

Kreatif hub difabel di area SPBU Lempuyangan Yogya.

YOGYA (KR) - SPBU Lempuyangan menjadi satu-satunya di Indonesia yang telah memiliki fasilitas workshop bagi penyandang disabilitas. Ruang kreatif disabilitas itu sekaligus menjadi tempat pameran produk serta simpul dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho, mengungkapkan pihaknya berkolaborasi dengan PT Pertamina Retail untuk mewujudkan kreatif hub tersebut. "Ini bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk memberdayakan rekan-rekan penyandang disabilitas," ungkapnya di sela peluncuran, Jumat (12/7).

Melalui jargon Difabelpreneur, pihaknya berupaya mendorong produktivitas penyandang disabilitas. Hal itu bahkan menjadi program unggulan seiring beragam kegiatan yang sudah digulirkan. Di antaranya di Boyolali ada Sriekandi Patra untuk produksi batik, Difabel Ampel yang membantu pengiriman LPG. Kemudian di Bantul ada griya sehat yang dikelola kaum difabel, serta program lain di berbagai daerah.

Pth Dirut PT Pertamina Retail, Mohammad Fitrawan Nur, menambahkan ruang workshop disabilitas itu merupakan pertama kalinya di Indonesia yang dibangun di area SPBU. Tidak menutup kemungkinan kreatif hub tersebut akan dikembangkan di SPBU lain yang memadai gu-

na memfasilitasi kegiatan bagi penyandang disabilitas. "Harapan kami Yogya semakin ramah difabel serta akses bagi mereka pun semakin terbuka. Seluruh komunitas difabel di Yogya tentu akan kita kolaborasikan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu turut diberikan pula bantuan kursi roda serta pelatihan perbengkelan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Selain memamerkan dan menjual aneka produk karya difabel seperti batik dan kerajinan, ruang tersebut juga digunakan usaha persewaan kursi roda. Selama ini kebutuhan kursi roda cukup tinggi sehingga bagi yang membutuhkan dengan penggunaan durasi pendek maupun panjang dapat terfasilitasi.

Sementara Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya, Maryustion Tonang, menyambut baik kolaborasi yang dibangun oleh PT Pertamina Retail dan PT Pertamina Patra Niaga tersebut. Menurutnya terdapat tiga unsur perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dan telah diatur melalui peraturan daerah. Ketiganya ialah jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi. Keberadaan kreatif hub difabel merupakan perlindungan dari aspek pemberdayaan. "Kami pun nantinya siap membantu hal-hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan tempat ini. Bagaimanapun kita harus memiliki kepedulian dan empati bagi penyandang disabilitas agar dapat terus eksis, terjaga harkat dan martabatnya serta terus produktif," tandasnya. **(Dhi)-f**

Dukung Pelaku UMKM Koperasi Rumah Ekosistem Ekonomi

YOGYA (KR) - Koperasi hadir untuk mengkonsolidasi, mengakselerasi, serta mengeskalasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah. Koperasi menjadi rumah ekosistem, yang mendukung pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Tanah Air. Dengan memberikan akses pendanaan, pengembangan produk, standarisasi, sertifikasi, dan pasar global, koperasi memperkuat posisi tawar kita di kancah dunia.

"Saat ini, lebih dari 99 persen pelaku usaha di Negeri ini adalah usaha mikro, yang sering kali rentan dan bersaing ketat satu sama lain. Namun, dibalik kerentanan ini, tersimpan kekuatan luar biasa yang siap bangkitkan, yaitu koperasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono pada upacara Hari Koperasi Ke-77 DIY di Lapangan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta pada Jumat (12/7).

Beny mengatakan, koperasi bukan sekadar entitas ekonomi. Koperasi adalah agen perubahan sosial yang membawa menuju peradaban yang lebih maju, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi.

Adapun salah satu upaya agar UMKM semakin kuat itu melalui koperasi. Dengan koperasi sebagai pilar utama akan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan, di mana kemakmuran dan kesejahteraan, dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Peringatan Hari Koperasi ke-77 diangkat tema 'Koperasi Sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil'. Tema tersebut sengaja diambil untuk menegaskan peran strategis koperasi dalam mengembangkan Indonesia Emas 2045. **(Ria)-f**

TAK SEBANDING DENGAN ALOKASI PENANGANAN SAMPAH Usulan Pengadaan Lahan RTHP Rp 12,5 Miliar Jadi Polemik

YOGYA (KR) - Usulan Pemkot Yogya untuk melakukan pengadaan lahan ruang terbuka hijau publik (RTHP) melalui perubahan anggaran tahun ini menjadi polemik. Hal ini muncul lantaran alokasi tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan sampah yang lebih mendesak.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, mengungkapkan APBD perubahan menjadi sarana efektif dalam menggeser kegiatan yang sifatnya mendesak. Apalagi tahun ini ada penambahan sebesar Rp 175 miliar yang harus dibelanjakan hingga akhir tahun. "Usulan kegiatan yang disampaikan tim eksekutif menjadi pencermatan. Kita semua tahu bagaimana masalah sampah di Kota Yogya belum juga tuntas. Masyarakat menaruh harapan sangat besar terkait hal itu. Tetapi nampaknya keberpihakan eksekutif masih kurang," tegasnya, Jumat (12/7).

Dirinya mencontohkan porsi anggaran perubahan untuk mengatasi sampah yang belum optimal. Sejauh ini hanya pengadaan alat insinerator sebanyak dua unit yang diusulkan dengan total Rp 7,4 miliar. Sementara ada pos lain yang belum mendasak justru diajukan dengan

alokasi yang cukup besar, yakni pengadaan lahan untuk RTHP di Kelurahan Muja Muju senilai Rp 12,5 miliar.

Menurutnya, dengan rentetan persoalan sampah yang telah terjadi selama satu tahun ini seharusnya masuk kondisi darurat. Oleh karena itu skala penanganannya pun harus menyesuaikan kondisi tersebut. Seperti halnya pada masa pandemi Covid-19, banyak kegiatan yang akhirnya dilakukan refocusing untuk menangani masalah itu. Oleh karena itu, alokasi Rp 12,5 miliar untuk pengadaan RTHP di Muja Muju akan lebih bijak jika dialihkan untuk penanganan sampah secara darurat. "Darurat ini bagaimana supaya setiap depo bersih dari sampah dan masyarakat tidak kesulitan. Kemudian langkah jangka panjang juga disiapkan. Perkaranya sampah di depo yang membludak itu mau ditaruh di mana, pasti ada solusi jika ada daya dukung anggaran. Rp 12,5 miliar sangat bisa untuk melakukan itu. Ini darurat dan butuh penanganan segera," tegasnya lagi.

Selama ini target yang dipatok eksekutif terkait sampah belum juga tercapai. Dari semula ditargetkan tuntas akhir Juni, namun hingga pertengahan Juli kondisi

depo masih terjadi penumpukan. Tumpukan sampah liar bahkan kerap ditemukan di beberapa pinggir jalan maupun ruang publik.

Pengadaan RTHP, imbuh Rifki, kebutuhannya belum mendesak seperti halnya penanganan sampah. Apalagi hal itu terkesan dipaksakan lantaran baru diusulkan melalui perubahan anggaran. Seharusnya, ketika sudah ada perencanaan matang terkait peruntukannya, sudah diajukan sejak APBD murni. Apakah akan difungsikan sebagai taman bermain, tempat olahraga, atau bahkan tempat pendidikan atau pertemuan mengingat lokasinya yang cukup luas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Wahyu Handoyo, mengaku masih melakukan pembahasan dengan mitra kerja di dewan. Selaku pengguna anggaran untuk pengadaan lahan RTHP, pihaknya juga akan menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Menurutnya, luas lahan RTHP di Muja Muju yang hendak dibeli Pemkot mencapai sekitar 2.000 meter persegi. Peruntukannya juga bisa dikapling menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. **(Dhi)-f**

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PENGALIHAN DARI BELANJA MODAL KE HIBAH

Pembangunan Kewilayahan Harus Tetap Optimal

YOGYA (KR) - Tahun ini pembangunan kewilayahan dari sebelumnya belanja modal beralih ke belanja hibah. Hal ini berdasarkan evaluasi Gubernur bahwa pembangunan menggunakan APBD harus tercatat sebagai aset Pemkot. Sementara fakta di lapangan banyak gang kampung dan jalan lingkungan belum semua milik Pemkot, sebagian merupakan persil warga. Meski demikian pembangunan wilayah tetap harus optimal.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya yang juga pimpinan Fraksi NasDem, Dwi Candra Putra, mengungkapkan dalam menyikapi hal tersebut sebelumnya sudah dibentuk tim dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan identifikasi jalan lingkungan. "Harapan kami dokumen itu segera selesai diidentifikasi. Mengacu Perwal 65/2023 perubahan atas Perwal 19/2023, jalan-jalan kampung bisa dilakukan pemeliharaan melalui APBD, tidak dengan hibah sehingga tentu penanganannya bisa lebih cepat," urainya.

**Dwi Candra Putra
Komisi A**



KR-Istimewa

Hasil identifikasi yang sudah dituangkan melalui keputusan walikota, harapannya juga segera dikonsultasikan ke BPK. Terutama untuk konsultasi apakah dasar perwal bisa digunakan untuk pencatatan aset.

Ketika hal tersebut memiliki kepastian hukum maka pembangunan wilayah bisa langsung masuk belanja modal, tidak melalui hibah.

Candra menambahkan, prosedur hibah dinilai sangat panjang lantaran harus masuk sebelum RKPD atau satu tahun sebelum anggaran berjalan. Selain itu juga harus melalui skema telaah dan evaluasi. Di samping itu, pelaporan sebagai pertanggungjawaban penggunaan hibah bukan hal mudah. "Tidak semua lembaga kemasyarakatan kelurahan penerima hibah itu familiar dengan pelaporan sesuai mekanisme pemeriksaan," tandasnya.

Oleh karena itu agar pembangunan wilayah dapat berjalan optimal maka seyogyanya dapat dimasukkan dalam belanja modal. Sehingga jika sewaktu-waktu membutuhkan pemeliharaan maka dapat langsung ditangani supaya kerusakan tidak meluas dan merugikan masyarakat. Hanya, agar masuk dalam belanja modal maka sesuai arahan Gubernur harus tercatat sebagai aset. **(Dhi)-f**